

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU – BUKU

- Syaukani,2005,*Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Hlm 191
- Lukman Santoso,2015,*Hukum Pemerintah Daerah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,Hlm 31
- Miriam Budiardjo,2007, *DPRD dan Peranannya*, Cet. I; Bandung, Bina Cipta.
- M. Mahfud M.D. 2000. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta, Hlm 12
- The Liang Gie,2009, *Partisipasi Masyarakat*, Cet. I; Jakarta, Gramed.
- Arbi Sanit, 1985. *Perwakilan Politik Di Indonesia.*, Jakarta : Rajawali
- HAW Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia: Dalam Rangka Sosialisasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Inu Kencana Syafii,2010, *Pengantar ilmu pemerintahan*, Refika Aditama, Jakarta.
- M.Nasroen,1954, *Soul Pembentukan Daerah Otonom dan Tingkatan Daerah Otonom*, Endang, Jakarta.
- Nawawi,Hadawi. 1994. *Pengawasan Melekat Di Lingkungan Aparatur Pemerintahan*. Jakarta : Erlangga
- Amlir Makmur & Ourmomowali, Reni Dwi, *Lembaga Perwakilan Rakyat*. (Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia,2005)
- Sanit,Arbi.1982. *Tata Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : Bumi Aksara
- Salindeho,1995. *Pengawasan Melekat Aspek Aspek Terkait Dan Implementasinya*.Jakarta : Bumi Aksara
- Hidayat,1964*Sekilas Tentang Pengawasan*, Majalah Keuangan.
- H.Bohari.*Pengawasan Keuangan Negara*
- Sujamto. *Aspek Aspek Pengawasan Di Indonesia*, (Sinar Grafika, Jakarta, 1987)

- Warta *Pengawasan*,Majalah Triwulan No. 24/September/TahunVII/1999
- Kansil C.S.T., *Pokok _ Pokok Pembangunan di Daerah*, (Jakarta, Aksaraka,1985)
- Made Pirdata, *Perencanaan Pendidikan Partisipasi dengan Pendekatan system.*, cipta, Jakarta; 1990
- Made Pirdata,1990,*Perencanaan Pendidikan Partisipasi dengan Pendekatan system*, Jakarta Cipta, Jakarta.
- Marzuki,1983, *Metodologi Riset*, PT Hanindita, Yokyakarta.
- Moleong, Lexy, J, 2004, *Metodelogi Penulisan Kualitatif. Remaja Rosda Karya*. Bandung.
- Muluk Khairul, M.R, 2007, *Mengugat Partisipasi Publik dalam Pemerintah Daerah, Sebuah Kajian Partisipasi Publik dengan Pendekatan Berfikir Sistem*. Bayu Media Publishing, Malang.
- Munir, B, 2002, *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Perspektif Otonomi Daerah*, Bapedda NTB, Mataram.
- Ni'matull Huda, 2012. *Hukum Pemerintah Daerah*, Nusamedia, Bandung.
- Nico Ngani,2012, *Metode Penulisan dan Penulisan Hukum*, Pustaka Yustisia.
- Riyadi dan Bratakusumah, Deddy Supriyadi,2005, *Perencanaan Pembangunan Daerah*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Robert Chambers, *Ideas For Development*, Earthscan, London, 2005
- Robert Chambers, *Ideas For Development*, Earthscan, London, 2005.
- Rozali Abdullah, 2010, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 35
- S. Nasution,2006, *Metode Research* (Penulisan Ilmiah), Bumi Aksara, Bandung.
- S.N.Jha dan P.C.Mathur,1999, *Decenhtralization and Local Politics*, 1St Published, Sage Publications India Ltd., New Delhi.
- Saiman,2017, *Politik Perbatasan. Inteligencia*, Media, Malang.
- Sirajuddin, dkk.2006, *Membangun Konstituen Meeting: Mempertemukan Kepentingan Daerah dengan Keterbatasan Wewenang DPD. YAPPIKA dan MCW*, Jakarta.

- Soekartawi,1990, *Prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan*. Rajawali Press, Jakarta.
- Soewoto Mulyosudarmo,2004,*Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi, Asosiasi Pengajar HTN dan HAN dan In-TRANS*, Malang.
- Susanto,2007, *Pengembangan KTSP dalam Perspektif Manajemen Visi, Matapena*, Jakarta.
- Suteki dan Galang Taufani,2018, *Metodologi Penulisan Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, Rajawali Pers, Depok.
- Wahidmurni,2008, *Cara Mudah Menulis Proposal Dan Laporan Penulisan Lapangan*. UM Press, Malang.
- Jimly Asshiddiqie,2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Cetakan 1, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Juanda,2008, *Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah*, PT Alumni, Bandung.
- Kell Antoft and Jack Novack, *Grassroots democracy: local Governmentin teh maritimes* (Nova Scotia: Henson College, Delhousie University, 1998.
- M.Nasroen, *Soul Pembentukan Daerah Otonom dan Tingkatan Daerah Otonom*, Endang, Jakarta, 1954
- Made Pirdata, *Perencanaan Pendidikan Partisipasi dengan Pendekatan system.*, cipta, Jakarta; 1990
- Made Pirdata. *Perencanaan Pendidikan Partisipasi dengan Pendekatan system*, Jakarta Cipta, Jakarta, 1990.
- Maria, S.W. Sumardjono, *Metodologi Penulisan Hukum*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2005

B. PERUNDANG – UNDANGAN

- Yuswanto, *Kedudukan Fraksi Di Dewan Perwakilan Rakyat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Mpr, Dpr, Dpd, Dan Dprd*. JOM Fakultas Hukum Volume III nomor II. 2016
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah.

C. JURNAL

Andi Gafriana Mutiah dengan judul:“ Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Pengelolaan APBD Guna Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Di kota Makassar “ (sumber sekripsi: UNIVERSITAS HASANUDDIN (FAKUKTAS HUKUM UNHAS MAKASSAR Program Studi Magister Ilmu Hukum (Konsentrasi Hukum Tata Pemerintahan Tahun 2008)

Dedi Fatria dengan judul : “ Pokok – pokok pikiran Sebagai Wujud Penyelenggaraan Aspirasi Masyarakat Oleh Dewan Perwakilan Daerah Dalam Menyusun Rancangan Kerja Pemerintah Daerah “ (Sumber Skripsi : UNIVERSITAS ANDALAS Program Magister Ilmu Hukum Tahun 2021)

D. WAWANCARA

Wawancara yang dilakukan di kantor DPRD Kota Padang Panjang dimulaipada tanggal 11 february 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023